

ANALISIS KEMAMPUAN RUTIN DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2008 - 2012

FAIRUZ

Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Email :

Abstract

This study entitled Analysis of Routine Capability in Tebo District Development Financing under the guidance of Drs. Adi Bhakti. SE., M.Sc. This study aims to determine Routine Capability is one of the basic capital of local government in financing regional expenditures, as measured by the Routine Capability Index ratio. The analysis technique used is through descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that with the growth of Local Own Revenue of 16.01% per year and the average growth rate of Regional Expenditure in Tebo Regency of 10.92% so that during the period 2008 - 2012 the ratio of ability index routine of 3.58% and this means that Regional Original Income (PAD) has a low ability to finance routine expenses.

Keywords: routine ability, financing, development

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Kemampuan Rutin Dalam Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Tebo dibawah bimbingan Drs. Adi Bhakti. SE., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Rutin merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, yang diukur dengan menggunakan rasio Indeks Kemampuan Rutin. Teknik analisis yang digunakan yaitu melalui analisis deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,01 % pertahun dan rata – rata tingkat pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Tebo sebesar 10, 92 % sehingga selama periode 2008 - 2012 rasio indeks kemampuan rutin sebesar 3,58 % dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang rendah dalam membiayai pengeluaran rutin.

Kata kunci : kemampuan rutin, pembiayaan, pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah tidak terlepas dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. Kemampuan keuangan merupakan satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Selama ini, Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah yang masih sangat rendah.

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian dan kemampuan keuangan yang selalu di dambakan Pemerintah Daerah.

Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan Undang – Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah untuk menggantikan system pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1, dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat elemen tersebut adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat Elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif, sehingga terciptanya kemampuan keuangan suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan baik.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak . Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber – sumber keuangan sendiri guna membiaya kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerataan dan keadilan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah.

Kemampuan keuangan daerah diukur dengan melihat dua aspek penting yakni ditinjau berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan melihat perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besarnya penerimaan daerah secara keseluruhan dan selain itu juga dapat ditinjau berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dengan melihat perbandingan persentase besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah yang distandarkan dengan kriteria masing-masing (Kuncoro,1995).

Sebagai gambaran Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tebo pada tahun 2007 yakni sebesar Rp. 12.077.135.584 ,- sedangkan di tahun 2012 sebesar Rp. 26.996.179.897. Apabila dilihat dari pengeluaran belanja daerah sehingga tercermin, realisasi belanja daerah di kabupaten Tebo pada tahun 2007 yakni sebesar Rp.354.917.481.484,- sedangkan ditahun 2012 realisasi belanja daerah sebesar

Rp. 622.194.738.971 ,-

Berdasarkan data diatas, diperoleh gambaran bahwa realisasi Pendapatan Asli daerah secara nominal lebih kecil dibandingkan belanja daerah . Sehingga apabila ditinjau dari sisi penerimaan asli daerah (PAD) artinya, tingkat kemampuan dalam membiayai belanja sangat rendah .

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Untuk keperluan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder , adapun data tersebut adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012
2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012

Data tersebut bersumber dari : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun serta instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berdasarkan rentang waktu periode 2008 – 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo.

Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis dekriptif kualitatif yaitu untuk melihat gambaran tingkat kemampuan rutin dalam pembiayaan pembangunan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan data sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab pokok permasalahan.

1. Rumus untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$TP\ PAD_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

2. Rumus untuk menghitung Pertumbuhan Belanja Daerah.

$$TPBD_t = \frac{BD_t - BD_{t-1}}{BD_{t-1}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber - sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin usaha- usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten

Tebp untuk tahun 2008 – 2012 dapat dilihat dari tabel berikut.

**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 – 2012**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2008	16.997.905.535	40,74
2009	18.174864.542	6,92
2010	15.956.427.539	- 12,20
2011	19.537.833.990	22,44
2012	26.996.179.897	38,17
Rata – Rata		16,01

Sumber : BPS Kabupaten Tebo Dalam Angka (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat diatas Rata – Rata Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo dari Tahun 2008 hingga 2012 sebesar 16,01 % pertahun. Selama Lima tahun terakhir pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2008, mengalami pertumbuhan sekitar 40,74 % dan pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp. 18.174864.542 atau tumbuh sekitar 6,92 sedangkan pada tahun 2010 Pendapatan Asli daerah kabupaten Sarolangun Menurun sekitar (12,20) dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 15.956.427.539, Menjadi sebesar 19.537.833.990 pada tahun 2011 , mengalami pertumbuhan sekitar 22,44 % sehingga pada tahun 2011 tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah terus meningkat yakni sebesar 26.996.179.897 atau mengalami pertumbuhan sekitar 38,17.

Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah sebesar 16,01 % merupakan pertumbuhan yang cenderung melambat sehingga realisasi pendapatan asli daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir sangat rendah, disebabkan oleh kurangnya mengali potensi sumber – sumber penerimaan PAD diakibatkan rendahnya efektifitas dan efisien dalam pemungutan pajak daerah mengakibatkan penerimaan pendapatan asli daerah proporsinya hanya 3.3 % pertahun terhadap total penerimaan daerah. Hal ini mencerminkan kurangnya upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai strategi intensifikasi pajak yang memungkinkan komponen – komponen PAD penerimaannya meningkat.

Perkembangan Belanja Daerah

Sementara perkembangan belanja daerah yang dihitung dari jumlah belanja operasi ditambahkan dengan belanja modal dan Belanja Tak Terduga Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo perkembangan belanja daerah cenderung berfluktuatif yang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2008	513.933.393.449	44,80 %
2009	484.388.404.051	(5,74)
2010	513.335.226.338	5,97
2011	536.206.300.826	4,45

2012	622.194.738.971	16,03
Rata – Rata		10,92 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2008 hingga 2012 sebesar 10,92 % per tahun. Pertumbuhan realisasi belanja daerah terus meningkat dari Rp. 513.933.393,45(2008) hingga mencapai Rp. 622.194.738,97 (2012), sedangkan pada tahun 2009 realisasi belanja daerah menurun menjadi Rp. 484.388.404,05 mengalami tingkat penurunan sekitar 5,74 %. Faktor penurunan jumlah belanja tidak dapat diasumsikan dengan realisasi jumlah penerimaan. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat Kemampuan Rutin dengan menggunakan rasio Indeks Kemampuan Rutin yang telah tersaji pada tabel dibawah ini :

Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Belanja Daerah(Rp)	IKR	KET
2008	16.977.905,53	513.933393,45	3,30	Sangat Kurang
2009	18.174.864,54	484.388.404,05	3,75	Sangat Kurang
2010	15.956.427,53	513.355.226,34	3,10	Sangat Kurang
2011	19.537.833,99	536.206.300,82	3,64	Sangat Kurang
2012	26.996.179,89	622.194.738,97	4,33	Sangat Kurang
Rata – Rata			3,58	

Dari hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa belanja daerah tahun pada tahun 2008 sebesar 513.933.393,45 Juta Rupiah dan ditahun 2012 yaitu menjadi 622.194.738,97 Juta Rupiah .Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat dilihat rata – rata indeks kemampuan rutin Kabupaten Tebo dari Tahun 2008 hingga 2012 sebesar 3,58 % pertahun.

Menurut uraian dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun terakhir pada Pemerintah Kabupaten Tebo masih dalam skala yang sangat kurang, karena masih berada dalam interval antara 0,00 – 20,00 yaitu sebesar 3,58 % dan ini berarti bahwa kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Tebo sangat kecil dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Sebagian besar dana yang dimiliki penerimaan daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang selalu besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat pertumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan besarnya dinas – dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS.

Apabila rasio Indeks Kemampuan Rutin di ukur berdasarkan masing – masing pos belanja maka Indeks kemampuan rutin terhadap Belanja Operasional secara rata – rata dari tahun 2008 – 2012 yakni sebesar 0,04 sedangkan indeks kemampuan rutin terhadap belanja modal sebesar 0,11 dan Indeks Kemampuan Rutin terhadap Belanja Tak Terduga sebesar 13,73 artinya kemampuan pendapatan asli daerah dalam menopang masing – masing pos belanja daerah sangat rendah sehingga perlu adanya optimalisasi dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Tebo dengan rata – rata tingkat pertumbuhan selama Tahun 2008 hingga 2012 sebesar 16,01 % pertahun. Sebagai daerah otonom yang sumber keuangannya seharusnya bertumpu dari Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhannya cenderung melambat dengan perolehan PAD yang relatif rendah sehingga tidak akan mampu untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri.
2. Pertumbuhan Belanja Daerah selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Tebo dengan rata – rata tingkat pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Tebo dari Tahun 2008 hingga 2012 sebesar 10,92 % sehingga dapat dikatakan pertumbuhan yang pesat.
3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Tebo masih dalam skala yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00 yaitu sebesar 3,58 %, dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam membiayai pengeluaran rutin.

Saran

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.

Untuk mengatasi kurang serasian antara belanja rutin dan belanja pembangunan sebaiknya pemerintah harus menetapkan standar ukuran atau patokan dalam mengambil kebijakan pembangunan agar terciptanya keserasian tersebut.

Untuk merangsang Rasio pertumbuhan, pemerintah sebaiknya mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Yogyakarta .
- Chalid, Pheni, 2005. *Keuangan Daerah, Investasi Daerah dan Desentralisasi*, Kemitraan , Jakarta
- Erlin, 2008. *Akuntansi Sektor Publik Untuk SKPD*, USU Press, Medan Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat Jakarta
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kifliansyah. 2001. *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Kustadi Arinta. 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mohammad Jimmi Ibrahiin. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang : Dahara Prize.
- Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Mudrajat Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Natahiddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di PropinsiJambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi OtonomiDaerah*, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- UU RI, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- UU RI, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Permen, 2009, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 , *Tentang Pengelolaan Keuan gan Daerah* pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.